

Implikasi Pembaruan Ekonomi Sosialis

A.R. SUTOPO

Persoalan dasar yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah apakah usaha-usaha pembaruan ekonomi oleh negara-negara komunis (sosialis) akan mempunyai pengaruh atas perkembangan dan kondisi internasional pada umumnya. Sebaliknya sifat-sifat hubungan ekonomi, politik dan keamanan internasional mungkin mempunyai pengaruh pula atas strategi pembaruan yang ditempuh oleh negara-negara sosialis dewasa ini. Jika demikian halnya, maka persoalan berikut yang patut diajukan adalah bagaimana negara-negara di luar mengartikan/menafsirkan usaha-usaha pembaruan yang dilakukan oleh negara-negara sosialis itu? Berdasarkan pengalaman dan penilaian itu, kebijaksanaan seperti apa yang dianggap wajar dalam menghadapi perkembangan-perkembangan di negara-negara sosialis seperti yang kini tengah berlangsung atau dalam pengupayaan untuk dilaksanakan?

Pada gilirannya, kebijaksanaan yang diambil oleh negara-negara lain itu tidak saja akan berpengaruh atas gagal atau berhasilnya usaha pembaruan negara-negara sosialis tetapi juga atas stabilitas, perdamaian, kesejahteraan, dan perkembangan internasional pada umumnya. Di sini terkandung suatu *dilema* kebijaksanaan antara samasekali tidak mendukung usaha-usaha pembaruan itu dan di lain pihak terlalu antusias menyambutnya tanpa memperhatikan implikasi yang dapat timbul daripadanya.

Secara lebih khusus, bagaimana Indonesia secara layak menentukan kebijaksanaan politiknya menghadapi usaha-usaha pembaruan negara-negara sosialis tersebut? Pada saat ini medan politik luar negeri terpenting bagi Indonesia berkaitan dengan usaha-usaha pembaruan negara-negara sosialis itu adalah kawasan Asia-Pasifik pada umumnya, dan Asia Tenggara pada khususnya. Di Asia Tenggara Vietnam, dengan tanpa menutup kemungkinan

bagi Laos dan Kamboja, yang mendominasi Indocina sedang mengusahakan pembaruan sistem sosial-ekonominya. Di lingkungan Asia-Pasifik, RRC sudah sejak menjelang akhir dasawarsa 1970-an melakukan serangkaian usaha pembaruan melalui program empat modernisasinya. Uni Soviet, yang sebagian wilayahnya berada di Asia-Pasifik, kini juga mengumandangkan kembali usaha-usaha pembaruan ekonominya di bawah kepemimpinan Mikhail Gorbachev.

Kalau kelak negara-negara ini berhasil dalam pembaruan ekonominya, apa konsekuensinya bagi Indonesia? Tetapi kalau mereka mengalami kegagalan, apakah akan terjadi konsekuensi positif atau negatif bagi kawasan Asia Tenggara pada umumnya, dan Indonesia pada khususnya? Uni Soviet, RRC dan Vietnam sudah cukup lama dicurigai sebagai pihak-pihak yang menganut garis politik agresif dan membahayakan stabilitas dan perdamaian internasional. Karena itu bagi Indonesia yang menganut asas politik luar negeri yang bebas dan aktif perlu secara dingin dan jernih menanggapi perkembangan-perkembangan tersebut supaya tidak terperosok ke dalam langkah yang merugikan.

PERBEDAAN SISTEMIK DAN KONFLIK TIMUR-BARAT

Dunia dewasa ini telah terbiasa dengan adanya sistem-sistem sosial-ekonomi dan politik yang berbeda antara negara satu dan lainnya. Salah satu perbedaan yang paling menonjol setelah berakhirnya Perang Dunia II adalah perbedaan sistemik antara demokrasi liberal plus kapitalisme dan komunis-sosialis. Bahkan perbedaan sistemik itu sering direduksi menjadi konflik Timur-Barat dengan pelaku utamanya Uni Soviet dan para sekutunya di satu pihak dan Amerika Serikat serta para sekutunya di lain pihak. Tetapi pada dasarnya perbedaan sistemik mempunyai ciri-ciri yang lebih khas daripada konflik Timur-Barat. Secara umum perbedaan sistemik itu mengandung unsur-unsur pokok sebagai berikut: (1) Kediktatoran proletariat lawan demokrasi liberal; (2) masyarakat berasas tunggal (monolitik) lawan masyarakat majemuk (pluralistik); (3) pengingkaran kebebasan individu lawan pengakuan dan jaminan atas kebebasan individu; dan (4) sistem perekonomian yang direncanakan secara tersentralisir lawan sistem ekonomi pasar. Antara unsur-unsur yang satu dan lainnya dianggap terdapat kaitan yang erat sehingga masing-masing sistem dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat.¹

Perbedaan sistemik ini melembaga sejak menjelang berakhirnya Perang Dunia I ketika Lenin dan kawan-kawan dalam Partai Komunis mengambil alih kekuasaan di Rusia. Berkuasanya Partai Komunis di satu negara ini

¹Lihat William Ebenstein, *Today's Isms: Communism, Fascism, Capitalism*, 5th Ed. (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1967), pada bab-bab yang relevan.

merupakan awal dari konflik mendalam dalam hubungan antar-negara, khususnya antara negara demokrasi liberal dan negara komunis. Konflik itu terutama berkembang antara negara-negara Eropa yang liberal dan Amerika Serikat di satu pihak, dan Uni Soviet di lain pihak. Tetapi dalam Perang Dunia II mereka bersatu untuk menghadapi ancaman Nazi Jerman yang ingin mendominasi seluruh Eropa.

Setelah Nazi Jerman kalah dan Perang Dunia II berakhir, konflik di antara dua sistem itu muncul kembali bahkan dengan intensitas yang jauh lebih tinggi. Maka kemudian berkembanglah apa yang lazim disebut sebagai Perang Dingin yang untuk beberapa lama dan dalam pasang naik dan pasang turun mendominasi percaturan internasional setelah Perang Dunia II. Konflik yang mengandung unsur-unsur perbedaan sistemik ini pulalah yang turut serta mengancam dan merusak perdamaian dunia seperti terlihat dari Krisis Berlin 1948, Perang Korea 1950-an, Perang Vietnam, hingga persaingan hebat dalam persenjataan nuklir yang tak kunjung selesai antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dewasa ini.

Suatu hal yang perlu disadari adalah terjadinya jalinan antara perbedaan sistemik dan unsur *power politics* antara Timur dan Barat, khususnya antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, dalam era setelah Perang Dunia II. *Power politics* yang dapat diartikan sebagai hubungan antar-negara yang dilandasi oleh prinsip bahwa "kekuatan menciptakan hak" ternyata menjadi unsur utama dalam percaturan hubungan Timur-Barat itu. Persaingan, persekutuan militer, daerah pengaruh, adalah beberapa istilah penting yang berkaitan dengan konflik sistemik dan *power politics*. Apa yang dialami dan disaksikan dunia kemudian adalah sosok hubungan internasional yang didominasi oleh perpaduan dua unsur tersebut.

Persaingan, konflik dan persekutuan militer itu terjadi tidak saja di Eropa tetapi juga di bagian dunia lainnya terutama setelah munculnya negara-negara baru di Asia dan Afrika sejak berakhirnya Perang Dunia II. Jika di Eropa garis perbedaan sistemik dan percaturan *power politics* itu sudah mulai mapan menjelang permulaan dasawarsa 1950-an hingga sekitar pertengahan dasawarsa itu, seperti dilancarkannya Marshall Plan, pembentukan NATO, Comecon dan Pakta Warsawa, di banyak bagian Asia, Afrika dan Amerika Latin tidak demikian halnya. Masalahnya menjadi lebih tampak jelas ketika sebutan Dunia Ketiga makin lazim dalam hubungan internasional. Pencarian sistem dan model sosial, ekonomi dan politik di bagian dunia ini merupakan perjuangan tersendiri yang hingga tingkat tertentu melibatkan dua sistem yang berbeda itu, selain keinginan untuk memiliki sistemnya sendiri yang khas. Oleh sebab itu terjadinya serangkaian konflik di berbagai penjuru Dunia Ketiga tidak saja disebabkan oleh perbedaan-perbedaan yang ada di dalam negeri sendiri dan situasi lokal/regional masing-masing, tetapi juga oleh

masuknya unsur perbedaan sistemik tersebut ditambah dengan perpanjangan konflik Timur-Barat.

Bahwa konflik-konflik yang berkembang kemudian lebih mempunyai bobot *power politics*, hal ini nyata dalam perkembangan hubungan Timur-Barat yang dikaitkan dengan dimensi sistemik. Dalam konflik Timur-Barat, sejak akhir dasawarsa 1940-an hingga kini, ternyata tidak semua negara komunis adalah musuh negara-negara Barat. Politik negara-negara Barat terhadap Yugoslavia yang tidak tunduk pada Moskwa sejak 1948, dicapainya detente dan makin tingginya intensitas hubungan ekonomi antara Eropa Barat dan Eropa Timur, dan politik Amerika Serikat terhadap RRC menunjukkan hal ini secara nyata. Karena adanya perlakuan yang tidak konsisten berdasarkan perbedaan sistemik dalam konflik Timur-Barat itu, orang yang sinis terhadap situasi ini, khususnya di Barat, menyatakan bahwa ternyata terdapat komunis yang baik dan komunis yang jelek.²

Memang sering terjadi juga konflik antar-negara yang lebih dilandasi oleh perbedaan sistemik daripada oleh unsur-unsur lainnya, seperti persengketaan wilayah, masalah etnis, agama dan persaingan politik (*power politics*). Konflik Vietnam Utara-Vietnam Selatan dulu yang kemudian melahirkan dipersatukannya Vietnam dewasa ini dan konflik Korea Utara-Korea Selatan merupakan contoh yang paling menonjol dalam jenis ini. Konflik Amerika Serikat dan Uni Soviet tampaknya juga dapat dimasukkan ke dalam kelompok ini juga meskipun sekarang lebih sulit untuk memisahkan konflik itu dari persaingan antar-negara adikuasa. Tetapi kebanyakan konflik-konflik yang terjadi di luar Blok Timur dengan Blok Barat umumnya lebih didasari oleh masalah-masalah geopolitik, termasuk di dalamnya soal persengketaan kedaulatan wilayah, masalah-masalah etnik, keagamaan, masalah perbedaan persepsi politik, dan persaingan kekuatan politik di dalam negeri sesuatu negara.³

Untuk banyak kasus ternyata perbedaan sistemik antara negara satu dan lainnya tidak menjadi rintangan untuk menjalin hubungan-hubungan yang bersahabat dan kerjasama. Hubungan negara-negara Barat dengan Yugoslavia dan RRC hanyalah salah satu contoh yang menonjol. Banyak negara non-komunis di Dunia Ketiga menjalin hubungan baik dengan negara-negara sosialis. Dalam gerakan Non-Blok yang tidak mendasarkan diri pada perbedaan sistem domestik para anggotanya, Indonesia, India, Singapura, Afghanistan, Kuba, Vietnam, Mozambik, Tanzania dan sederetan negara lain mencoba bekerjasama untuk perdamaian dan kesejahteraan internasional.

²Lihat, misalnya, Harry Rositzke, *Managing Moscow, Guns or Goods?* (New York: William Morrow and Company, Inc., 1984).

³Mengenai analisa demikian ini, lihat misalnya Louis J. Cantori dan Steven L. Spiegel, eds., *The International Politics of Regions: A Comparative Approach* (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1970).

Meskipun dalam praktek perbedaan sistem domestik tidak harus mencegah kemungkinan terjadinya persahabatan, kerjasama dan hidup berdampingan secara damai, kecenderungan untuk mempersamakan *perbedaan* dengan *konflik*, khususnya dalam konteks sistemik seperti disebutkan di atas, sering membuat hubungan antar-negara menjurus pada pertentangan, ketegangan dan bahkan perang. Tetapi masalah ini tampaknya erat berkaitan dengan persepsi pihak-pihak yang terlibat satu dengan lainnya dalam kurun waktu tertentu, dan dalam situasi lingkungan tertentu. Ini kiranya merupakan sesuatu yang wajar mengingat tiadanya suatu badan internasional yang mempunyai otoritas/wewenang mutlak dalam menentukan apa-apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat negara-negara demi tercapainya tujuan bersama.⁴ Prasangka yang tumbuh karena perbedaan sistemik bisa jadi memperbesar timbulnya peluang untuk konflik antar-negara. Tetapi hal serupa sebenarnya juga dapat terjadi dengan negara-negara yang memiliki sistem sosial, ekonomi dan politik yang hampir serupa atau tidak jauh berbeda.

Persepsi akan kemungkinan timbulnya konflik karena perbedaan sistemik dapat diperbesar lagi kalau hal itu disertai oleh kecenderungan kuat untuk memisahkan hubungan politik-keamanan antar-negara dengan hubungan ekonominya. Dari sebab itu tidak jarang terjadi apa yang dilihat sebagai suatu konflik sistemik oleh masyarakat Barat, misalnya, tampaknya hanya benar untuk sebagian saja sedangkan untuk sebagian lainnya tidak benar. Amerika Serikat yang gigih berusaha membendung pengaruh Soviet, misalnya, secara sadar melakukan perdagangan dengan Uni Soviet khususnya dalam hasil-hasil pertaniannya. Terlebih lagi politik Amerika Serikat yang pada dasarnya adalah untuk membendung (*containment policy*)⁵ meluasnya pengaruh dan kekuatan komunis di dunia tidak selaras dengan makin dekatnya hubungan negeri itu dengan RRC baik dalam bidang-bidang sosial dan ekonomi di satu pihak maupun dalam bidang politik dan kerjasama militer di lain pihak.⁶

Sejumlah masalah lain mungkin saja masih dapat dikemukakan untuk menilai apakah konflik Timur-Barat itu identik dengan konflik sistemik. Perbedaan persepsi dan kepentingan antara Amerika Serikat di satu pihak dan sekutu-sekutunya di Eropa Barat di lain pihak mendorong timbulnya perbe-

⁴Lihat, Kenneth N. Waltz, *Man, the State and War: A Theoretical Analysis* (New York: Columbia University Press, 1959). Waltz justru berangkat dari sifat anarki masyarakat internasional yang tidak mengenal otoritas sentral itu. Maka perdamaian, dan bukannya perang, antar-negara yang harus diterangkan.

⁵Tentang *containment policy*, lihat John Lewis Gaddis, *Strategies of Containment: A Critical Appraisal of Post-war American National Security Policy* (New York: Oxford University Press, 1982).

⁶Tentang beberapa segi hubungan Amerika Serikat dan RRC dewasa ini, lihat, misalnya, Hong N. Kim dan Jack L. Hammersmith, "U.S.-China Relations in the Post-Normalization Era, 1979-1985," *Pacific Affairs* (Spring 1986): hal. 69-91.

daan dan perselisihan di antara mereka mengenai hubungan mereka masing-masing dengan negara-negara Blok Soviet, baik dalam bidang-bidang politik, keamanan, sosial maupun ekonomi.⁷ Di antara negara-negara komunis sendiri terdapat perbedaan kepentingan, persepsi dan bahkan persaingan sehingga pendekatan mereka pada negara-negara kapitalis bisa berlainan samasekali antara satu dan yang lain. Demikian juga pendekatan dan sikap kedua kubu Barat dan Timur serta negara-negara anggotanya secara individual terhadap negara-negara dan persoalan di negara-negara Dunia Ketiga. Pendekatan mereka tampaknya lebih cenderung ditentukan oleh persepsi dan kepentingan nasional masing-masing daripada oleh kepentingan blok yang dihubungkan dengan persaingan sistemik semata-mata.

DIMENSI INTERNAL DAN EKSTERNAL PEMBARUAN NEGARA-NEGARA SOSIALIS

Salah satu segi yang dikhawatirkan oleh banyak negara non-komunis dalam berhubungan dengan negara-negara komunis adalah sifat tertutup mereka dan aspek ideologi komunis yang dianggap sebagai sesuatu yang ekspansionis karena tujuan mereka untuk mencapai terselenggaranya suatu masyarakat dunia yang komunistis. Meskipun dalam beberapa kasus terdapat bukti-bukti bahwa ketertutupan sistem sosial, ekonomi dan politik mereka masih mampu menunjukkan kemampuan untuk melakukan industrialisasi yang mendekati kemajuan negara-negara kapitalis, khususnya dalam bidang militer,⁸ kemajuan ekonomi mereka pada umumnya tidak seperti yang diharapkannya sendiri, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan. Kekakuan mereka untuk menerapkan sistem perekonomian yang doktriner dan tersentralisir, seperti diuraikan dalam rangkaian tulisan sebelumnya, telah mengakibatkan kemacetan ekonomi dan bahkan kemungkinan tertinggal dalam perkembangan masa depan bahkan oleh negara-negara yang semula tingkat perkembangannya berada di belakang mereka.⁹

Ketika mereka pada umumnya menganut garis perekonomian yang Stalinis, baik negara-negara yang tergabung dalam Comecon maupun RRC berpandangan bahwa menjalin hubungan ekonomi khususnya dengan negara-

⁷Lihat juga, A.R. Sutopo, "Ambivalensi Hubungan Timur-Barat," *Analisa*, Tahun XVI, No. 2 (Februari 1987): hal. 97-110.

⁸Hal ini terutama berlaku untuk Uni Soviet, dan dalam tingkat tertentu juga bagi RRC. Tentang perkembangan domestik berbagai negara komunis, lihat uraian-uraian yang disajikan dalam seri *Analisa* terbitan ini.

⁹Dapat dibandingkan misalnya tingkat perkembangan ekonomi Korea Utara dengan Korea Selatan sejak dua negara itu berdiri. Juga dapat dibandingkan perkembangan ekonomi Czechoslovakia, Polandia, dan Rumania dengan perkembangan ekonomi Korea Selatan, Taiwan, bahkan juga dengan Hong Kong dan Singapura.

negara kapitalis dan perdagangan dengan negara-negara lain mengandung bahaya-bahaya tertentu. Mereka tidak menghendaki timbulnya pengaruh-pengaruh yang tidak dikehendaki atas perekonomian nasional dan kehidupan masyarakatnya karena sistem yang berbeda itu. Lagipula, mereka juga mengkhawatirkan terjadinya ketergantungan pada perdagangan internasional sehingga usaha-usaha untuk menciptakan masyarakat komunis semakin sulit terlaksana, bahkan dalam usaha menciptakan masyarakat seperti itu di negerinya sendiri. Mereka juga menginginkan masyarakat dan negaranya kaya dan kuat, tetapi mereka lebih mengandalkan kekuatan dan potensinya di dalam negeri sendiri dalam mencapainya. Karena itu tidak terlalu salah kalau orang menyebut bahwa negara-negara komunis merupakan negara yang paling proteksionis, dan perdagangan internasional terjadi terutama di kalangan mereka sendiri.

Bersamaan dengan itu, di bawah Stalin kepeloporan Soviet setelah Perang Dunia II untuk memperluas sistem komunis di luar wilayah-wilayah yang telah masuk ke dalam daerah pengaruh Soviet tidak disertai pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah di negara-negara di luar dunia kapitalis. Dengan perkataan lain, negara-negara sosialis/komunis pada waktu itu masih lebih banyak dibebani oleh soal-soal yang secara langsung berhubungan dengan persaingannya melawan dunia kapitalis. Oleh sebab itu, meskipun di berbagai negara sedang berkembang juga terdapat Partai Komunis baik legal maupun yang bergerak di bawah tanah, dukungan Soviet kepada mereka untuk perjuangan politik lebih bersifat tidak langsung, kecuali di Korea Utara, Cina, dan hingga tingkat tertentu di Iran, Turki dan Yunani. Setelah Khrushchev tampil, Uni Soviet memang makin memperhatikan kesempatan-kesempatan yang ada di negara-negara Dunia Ketiga untuk memperluas daerah pengaruhnya. Tetapi tampaknya usaha-usaha yang dilakukan itu, seperti di Indonesia, Mesir dan kemudian di berbagai bagian dunia lainnya lebih ditentukan oleh kepentingan Soviet dalam persaingan Timur-Barat daripada untuk memperluas ideologi komunis semata-mata.¹⁰ Itulah sebabnya mengapa Uni Soviet sering memberi bantuan kepada pemerintah-pemerintah negara berkembang yang memusuhi kelompok atau partai komunis di dalam negerinya sendiri.

Negara-negara komunis, khususnya Uni Soviet, kemudian belajar untuk dapat lebih memahami masalah-masalah sosial, ekonomi dan kebudayaan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang sehingga ia dapat menjalin dan menyalurkan bantuan kepada pihak-pihak yang didukungnya secara lebih efektif. Cina yang kemudian juga menginginkan perannya sendiri dalam dunia internasional setelah perpecahannya dengan Uni Soviet juga berusaha mencari pengaruh di antara negara-negara sedang berkembang. Salah satu aspek

¹⁰Lihat, misalnya, Alvin Z. Rubinstein, ed., *Soviet and Chinese Influence in the Third World* (New York: Praeger Publishers, 1975).

terpenting dari cara dukungan itu ialah memberikan bantuan militer, sedang bantuan ekonomi lebih terbatas. Dan karena keterbatasan kemampuan ekonomi mereka sendiri, baik untuk peningkatan mutu hidup masyarakatnya sendiri maupun untuk membantu pihak luar, setelah terjadinya perubahan dalam konstelasi politik internasional mereka menghadapi masalah serius.

Banyak negara berkembang kemudian mencari bantuan keuangan dan kredit kepada negara-negara kapitalis atau mereka yang dekat hubungannya dengan negara kapitalis. Jadi, bantuan militer negara-negara komunis kepada berbagai negara sedang berkembang tidak didukung oleh bantuan ekonomi yang memadai. Bahkan karena kelemahan ekonominya itu maka terjadi suatu hal yang simbiosis: bantuan militer Soviet kepada berbagai negara berkembang menjadi salah satu sumber baginya untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Oleh sebab itu Uni Soviet juga mendorong negara-negara sedang berkembang yang dibantunya untuk mendapatkan bantuan ekonomi dari negara-negara Barat.¹¹

Satu hal yang perlu dicatat ialah bahwa pada saat di dalam negeri menghadapi problem ekonominya sendiri negara-negara komunis memberikan bantuan militer kepada negara-negara berkembang yang didukungnya. Akibat dari hal ini ialah bahwa negara-negara komunis justru turut serta mengancam perdamaian dan stabilitas internasional. Negara-negara Barat pun tidak luput dari tanggung jawab atas berbagai kekisruhan di banyak bagian negara-negara berkembang. Konfrontasi Indonesia-Malaysia, Perang Vietnam, konflik India-Pakistan, konflik Arab-Israel, kemelut di berbagai bagian Benua Afrika tidak dapat dilepaskan samasekali dari hal itu.

Jika kini terdapat serangkaian usaha negara-negara komunis untuk melakukan pembaruan ekonomi, hal itu tidak lepas dari dimensi internal dan eksternal yang mereka hadapi. Kelambanan dan kemacetan pertumbuhan ekonomi karena sentralisasi yang sangat ketat dalam perencanaan, mitos *full-employment* yang memang dapat dipertahankan tetapi dengan mengorbankan efisiensi dan kualitas produksi, dan penetapan target yang harus dicapai dalam bidang produksi merupakan beberapa faktor penting di balik kesulitan ekonomi mereka. Sementara itu porsi perdagangan internasional mereka yang lebih besar hanya dilakukan di antara negara-negara komunis sendiri merupakan faktor lainnya dari kesulitan ekonomi mereka. Dari sebab itu, untuk menghadapi makin ketertinggalan perkembangan ekonominya dari negara-negara Barat dan negara-negara industri baru, mereka melakukan pembaruan kebijakan ekonomi.

Pembaruan ekonomi itu ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan mutu hasil-hasil produksi. Perencanaan, pengorganisasian dan pengelo-

¹¹Lihat, Elizabeth Kridl Valkenier, "East-West Economic Competition in the Third World," dalam *East-West Tensions in the Third World*, diedit oleh Marshall D. Shulman (New York: W.W. Norton & Company, 1986), hal. 158-180.

laan perekonomian, penentuan prioritas bidang-bidang yang hendak dikembangkan, cara distribusi produksinya, pemberian insentif kepada para pekerja atau petani, kebijaksanaan harga dan sistem penggajian merupakan beberapa bidang utama yang mendapatkan perhatian besar dari berbagai negara komunis untuk pembaruan ekonomi itu. Korupsi, birokratisasi yang berlebihan, terlalu banyak pegawai, tumpang-tindih dan inefisiensi serta konservatisme ideologis merupakan beberapa bidang yang digugat. Peningkatan ekspor dan investasi asing dari negara-negara kapitalis menjadi bidang-bidang yang tidak ditabukan lagi, meskipun "harus diwaspadai," sebab mereka juga menyadari situasi internasional yang makin kompleks.

Karena keinginan mereka untuk lebih mengembangkan ekspor ke negara-negara non-komunis, implikasi daripadanya adalah meningkatnya peranan perdagangan internasional dalam kehidupan perekonomian nasional mereka. Hal ini membawa konsekuensi lebih lanjut, yaitu semakin kuatnya saling-ketergantungan¹² perekonomian sosialis dengan non-sosialis. Arus ekspor-impur akan menjadi bagian penting dan dalam kaitan ini mau tidak mau aspek persaingan dengan negara-negara lain tidak dapat dihindari. Kebutuhan untuk memasuki berbagai pasar menghendaki diperhatikannya mekanisme penawaran dan permintaan serta cara-cara yang kurang lebih lazim diterima dalam transaksi internasional. Artinya, perundingan dan adaptasi dengan negara-negara lain menjadi salah satu unsur yang akan makin penting jika kehendak negara-negara sosialis/komunis untuk terlibat dalam perdagangan internasional yang semakin besar hendak dicapai.

Bahwa negara-negara komunis itu ingin masuk ke pasaran internasional yang lebih luas dan mencari sumber-sumber investasi dan keuangan internasional untuk mendukung program pembaruannya merupakan hal yang dikehendaki juga, tidak perlu diuraikan di sini. Salah satu cerminan dari keinginan mereka adalah masuknya beberapa negara sosialis ke dalam GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) yang berhubungan dengan tertib perdagangan internasional dan dalam IMF (*International Monetary Fund*) serta Bank Dunia yang berkaitan dengan sumber-sumber modal dari lembaga keuangan internasional. Hongaria, Rumania dan Yugoslavia menjadi anggota tiga organisasi tersebut. Kuba, Czechoslovakia dan Polandia adalah anggota GATT. Sementara itu, Vietnam dan RRC adalah anggota IMF dan Bank Dunia. Tetapi RRC, dan Uni Soviet, tahun 1986 yang lalu telah mengajukan lamaran untuk menjadi anggota GATT juga.

Tampaknya juga disadari oleh negara-negara komunis bahwa pengaruh krisis ekonomi internasional dewasa ini tidak hanya menimpa sistem-sistem

¹²Lihat Reinhard Rode, "East-West Trade and Detente," dalam *Economic Warfare or Detente: An Assessment of East-West Economic Relations in the 1980s*, diedit oleh Reinhard Rode dan D. Jacobsen (Boulder and London: Westview Press, 1985), hal. 1-15. Lihat juga Jozsef Bognar, "Economic Crisis in the Age of Mutual Dependences," *The New Hungarian Quarterly*, Vol. XXIV, No. 91 (Autumn 1983): hal. 57-68.

ekonomi non-sosialis tetapi juga perekonomian negara-negara komunis. *Internasionalisasi* proses ekonomi itu tentu saja bisa dilihat secara berbeda oleh sistem ekonomi yang berorientasi pasar (*market-oriented*) dan sistem ekonomi sosialis. Oleh mereka yang menganut sistem ekonomi pasar, makin terjadinya saling ketergantungan antar-ekonomi negara-negara di dunia diharapkan akan mendorong terjadinya transformasi sistem ekonomi, sekalipun secara perlahan-lahan, dan berpengaruh pada sistem nilai yang berlaku di negara-negara komunis. Di lain pihak, negara-negara sosialis menganggap bahwa hal itu merupakan hasil dari proses sosial dan politik yang dilakukannya secara sadar.¹³ Tetapi tampaknya semua pihak menyadari bahwa karena saling ketergantungan itu maka kekakuan hubungan antar-negara dapat menjadi lebih lunak. Artinya, hubungan antar-negara akan mengarah pada jalan yang kurang bermusuhan dalam menghadapi perbedaan kepentingan di antara mereka.

IMPLIKASI GLOBAL

Yugoslavia merupakan salah satu contoh klasik dari suatu sistem ekonomi sosialis yang sejak lama menyadari pentingnya interdependensi dengan masyarakat internasional secara luas bagi kemajuan ekonomi nasionalnya. Oleh negara-negara Barat ia dipandang sebagai negara komunis yang baik dan bersamaan dengan itu negara-negara Barat menyambut usaha-usaha pembaruan perekonomian yang dilakukannya. Penolakannya untuk masuk ke dalam orbit Soviet sejak menjelang akhir dasawarsa 1940-an dan karena secara relatif ia adalah negara kecil, Yugoslavia yang komunis dipandang oleh berbagai pihak sebagai negara yang tidak ekspansionis. Beban internal dan eksternal merupakan faktor-faktor penting bagi masuknya Yugoslavia ke dalam Gerakan Non-Blok dan bahkan kemudian ia mendapatkan reputasinya yang menonjol dalam gerakan ini.

Di pihak blok Timur memang tampak bahwa Uni Soviet mendominasi hubungan antar-negara dalam Pakta Warsawa maupun dalam Comecon. Sebab itu dalam tubuh masing-masing negara anggota blok Timur ini terdapat faktor-faktor yang sering menimbulkan persoalan dalam hubungan mereka masing-masing dengan Uni Soviet. Tidak mengherankan jika dalam persekutuan dan organisasi semacam itu terdapat usaha-usaha terus-menerus dari anggotanya yang lebih kecil untuk melawan dominasi anggota yang lebih besar.¹⁴ Hal ini secara sebagian menerangkan mengapa negara-negara Barat menerima beberapa negara Eropa Timur untuk masuk ke dalam GATT kendati sistem perdagangan yang mereka lakukan berbeda samasekali. Amerika Serikat khususnya berpandangan bahwa preferensi semacam itu akan dapat

¹³*Ibid.*, hal. 65-67.

¹⁴Ikuti analisa Ivan Volgyes, "Troubled Friendship or Mutual Dependence? Eastern Europe and the USSR in the Gorbachev Era," *Orbis*, Vol. 30, No. 2 (Summer 1986): hal. 343-353.

memenuhi kepentingan-kepentingan politik Barat seperti lebih terbukanya negara-negara Eropa Timur terhadap nilai-nilai Barat, berkurangnya ketergantungan mereka pada Uni Soviet, dan terciptanya hubungan yang lebih bersahabat dengan mereka.¹⁵ Meskipun tidak seluruh kepentingan terpenuhi, sekurang-kurangnya terdapat petunjuk bahwa hubungan antara negara-negara Barat dan Eropa Timur dapat berlangsung lebih baik.

Terjadinya perubahan politik domestik RRC dalam dasawarsa 1970-an juga membawa implikasi dalam hubungan luar negerinya. Sejak tampilnya kelompok moderat dan pragmatis di negeri itu, dan kemudian usaha yang dilakukannya untuk mendukung program modernisasi merupakan faktor penting yang mendorong meningkatnya hubungan RRC dengan negara-negara Barat dan Jepang. Amerika Serikat yang sangat berkepentingan dalam strategi dan politiknya menghadapi Uni Soviet menyambut baik usaha modernisasi Cina itu dan bahkan secara besar-besaran membantunya dalam bidang ekonomi, teknologi, sosial-budaya dan bahkan militer.¹⁶ Sementara itu demi suksesnya modernisasi RRC menunjukkan perubahan sikap politik luar negeri yang lebih akomodatif terhadap lingkungan internasional. Oleh Barat ia tidak dipandang lagi sebagai suatu negara komunis yang agresif dan membahayakan stabilitas dan keamanan internasional, kendati dalam permulaan tahun 1979 ia melakukan agresi terhadap Vietnam karena kepentingan politiknya di Asia Tenggara, khususnya di Indocina.

Lalu bagaimana dengan usaha-usaha yang ingin dilakukan oleh Gorbachev untuk melakukan pembaruan di negerinya? Sulit memang untuk membuat suatu penilaian hubungan antara politik dan ekonomi dalam bidang ini karena masalah yang dihadapi langsung berhubungan dengan persaingan dua negara adikuasa. Dalam hubungan Timur-Barat ketika era *detente* mencapai puncaknya pada tahun-tahun 1970-an, terlihat hubungan timbal-balik antara bidang ekonomi dan politik.¹⁷ Meredanya ketegangan politik dan militer di antara mereka disertai oleh meningkatnya perdagangan, pemberian kredit, transfer teknologi dan kerjasama industri di antara mereka. Tetapi perbedaan penafsiran mengenai *detente* antara Amerika Serikat dan Uni Soviet menimbulkan kesulitan-kesulitan baru dalam hubungan Timur-Barat, khususnya jika hal itu dikaitkan dengan persaingan mereka di negara-negara Dunia Ketiga. Sementara sekutu-sekutu Amerika Serikat di Eropa umumnya menghendaki diteruskannya suasana *detente* dengan Eropa Timur dan Uni Soviet karena kepentingan-kepentingan mereka yang langsung terlibat dalam hubungan itu memang besar, Amerika Serikat tampak tidak mempercayai lagi iklim *detente*

¹⁵Lihat dalam Penelope Hartland-Thunberg, "China's Modernization: A Challenge for the GATT," *The Washington Quarterly* (Spring 1987): hal. 81-98, khususnya hal. 84-85.

¹⁶Kim dan Hammersmith, "U.S.-China Relations."

¹⁷Perbandingan situasi antara periode *detente* dan setelah *detente*, lihat dalam Rode dan Jacobsen, *Economic Warfare or Detente*.

dengan Uni Soviet dipertahankan.

Karena itu pula kini terlihat perbedaan sikap antara Eropa Barat dan Amerika Serikat terhadap usaha pembaruan ekonomi dan sosial oleh Gorbachev. Kepentingan-kepentingan Eropa Barat umumnya cenderung mendorong mereka untuk mendukung, hingga tingkat tertentu, upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Gorbachev. Tetapi karena persaingannya dengan Uni Soviet dalam kerangka politik global, Amerika Serikat tampak lebih hati-hati. Pemerintahan Reagan tampaknya masih belum yakin tentang arah yang hendak dituju oleh Gorbachev dan tentang konsekuensinya lebih lanjut bagi hubungan kedua negara adikuasa itu.

Persaingan dua raksasa militer dunia ini tampaknya akan menjadi salah satu bagian utama dalam hubungan mereka. Karena itu sulit melihat bagaimana sebenarnya tanggapan Amerika Serikat terhadap pembaruan Soviet itu. Meskipun Amerika Serikat juga terlibat dalam persetujuan Konferensi Keamanan dan Kerjasama Eropa (CSCE) di Helsinki tahun 1975 dan dua pertemuan puncak (KTT) telah diselenggarakan antara Reagan dan Gorbachev, sambutannya terhadap inisiatif Gorbachev untuk pembaruan akan dipengaruhi antara lain oleh bagaimana hal itu tercermin pada hubungan Soviet dengan negara-negara Eropa Timur, sikapnya terhadap negara-negara Dunia Ketiga pada umumnya, dan perubahan kebijaksanaan domestik Soviet dalam masalah "hak-hak asasi" penduduknya sendiri.¹⁸

IMPLIKASI BAGI INDONESIA

Bagi Indonesia tentu medan yang paling berpengaruh adalah perkembangan-perkembangan yang terjadi di Vietnam, RRC dan Uni Soviet. Karena kepentingan langsungnya dengan kawasan Asia-Pasifik dan Asia Tenggara khususnya, Indonesia dihadapkan pada pilihan-pilihan kebijakan dalam menanggapi pembaruan di negara-negara komunis yang secara geografis dekat itu. Suatu kekeliruan dalam melihat dan menanggapi gejala yang sedang berkembang dalam lingkungan eksternal ini mungkin akan membawa akibat-akibat yang dapat merugikan kepentingan Indonesia.

Dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarsa terakhir ini hubungan Indonesia dengan tiga negara komunis tersebut terlihat mengalami perubahan-perubahan yang berarti. Dengan Vietnam, kendati seringkali tersandung oleh masalah Kamboja, usaha-usaha pendekatan dan peningkatan hubungan baik dalam bidang politik maupun ekonomi diusahakan. Pendekatan-pendekatan itu pada dasarnya menyangkut hubungan bilateral seperti usaha menyelesaikan batas landas kontinen di sekitar Natuna, peningkatan perdagangan dan

¹⁸Tentang sikap Amerika Serikat dewasa ini, ikuti, misalnya, Michael Mandelbaum dan Strobe Talbott, *Reagan and Gorbachev* (New York: A Council on Foreign Relations Book, 1987).

masalah keamanan kawasan seperti soal penyelesaian Kamboja.

Dengan RRC, meskipun hubungan diplomatik antara kedua negara belum juga dibuka kembali, hubungan ekonomi sudah dibuka secara langsung dan bahkan dalam hubungan sosial-budaya, seperti dalam bidang olahraga, juga sudah mulai dilakukan. Khususnya dalam menghadapi era setelah minyak bumi dan penggalakan ekspor non-migas, berbagai misi dagang dan ekonomi Indonesia dikirim ke RRC, Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur. Pada intinya, terdapat usaha yang secara sadar dilakukan baik oleh pemerintah maupun kalangan swasta di Indonesia untuk meningkatkan dan memperbaiki hubungannya dengan negara-negara komunis.

Pada saat negara-negara sosialis itu tengah melakukan pembaruan perekonomian mereka, adakah akibat-akibat tertentu bagi Indonesia? Meskipun masalah ini lebih banyak bersifat ekonomi, tampaknya akan terjadi implikasi tidak hanya dalam bidang ekonomi dan perdagangan tetapi juga dalam bidang politik dan keamanan internasional. Lebih khusus lagi hal ini juga berlaku bagi kawasan Asia-Pasifik dan Asia Tenggara. Beberapa perkiraan berikut ini mungkin pantas dipertimbangkan yang dapat dikaitkan dengan pilihan-pilihan kebijakan bagi Indonesia dalam menghadapi keadaan tertentu itu.

Dari segi ekonomi dan perdagangan, ketiga negara sosialis utama di kawasan Asia-Pasifik itu pasti menghendaki keberhasilan program-programnya. Ke dalam mereka menginginkan peningkatan taraf hidup penduduk dan kemampuan ekonomi nasionalnya. Ke luar, mereka membutuhkan pasar dan sumber-sumber dana untuk mendukung programnya masing-masing. Indonesia pun sejak lama mengupayakan peningkatan taraf hidup masyarakatnya, ketangguhan ekonomi nasional, dan perluasan perdagangan internasional serta sumber-sumber dana luar negeri untuk pembiayaannya. Karena adanya sistem sosial ekonomi yang berbeda, pada dasarnya apa yang akan ditempuh oleh masing-masing negara ini adalah suatu upaya untuk membuktikan kepada masyarakatnya sendiri dan kepada dunia luar bahwa mereka masing-masing sesuai dengan asas yang dianutnya dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya melalui berbagai penyesuaian baik dalam negeri maupun dalam berhubungan dengan dunia luar. Secara implisit di sini telah terkandung unsur persaingan antar-sistem yang berbeda itu dalam mengelola dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi.

Jika usaha-usaha pembaruan negara-negara komunis itu dalam perjalanannya menunjukkan hasil-hasil positif tertentu, apakah artinya bagi Indonesia? Dalam hal ini Indonesia diperkirakan akan lebih bersaing dengan RRC dan Vietnam. Persaingan akan bisa terjadi dalam hal pemasaran hasil-hasil pertanian dan industri yang mereka kembangkan masing-masing, terutama dalam hal hasil-hasil yang kurang lebih serupa atau bahkan sama, di pasar internasional dan mungkin juga dalam pasaran domestik masing-masing. Un-

tuk sementara waktu kalau Vietnam berhasil mungkin persaingan dalam komoditi primer hasil-hasil pertanian merupakan tantangan yang harus dihadapi Indonesia. Dengan RRC mungkin persaingan berebut pasar terjadi dalam bidang hasil-hasil pertanian primer dan olahan serta hasil-hasil industri. Hingga tingkat tertentu dalam hal yang terakhir ini mungkin Uni Soviet juga akan menjadi saingan. Itu semua akan menjadi tantangan yang mungkin tidak ringan bagi perdagangan internasional Indonesia karena akan dipengaruhi oleh mutu produksi, harga, selera konsumen, dan prosedur perdagangan yang harus dilalui.

Di lain pihak, keberhasilan pembaruan mereka juga bisa menciptakan pasar baru bagi hasil-hasil produksi Indonesia. Terjadinya peningkatan taraf hidup masyarakat dan perekonomian sosialis itu bisa diperkirakan juga disertai peningkatan daya beli untuk barang-barang yang hingga kini masih dianggap "bukan kebutuhan pokok, asing, barang mewah, atau konsumsi borjuis." Tentu mereka tidak dapat serentak menghasilkan barang-barang produksi di segala bidang. Dan dalam bidang-bidang yang belum dapat mereka penuhi sendiri dan kompetisinya kurang kuat, Indonesia sebenarnya mendapatkan peluang pasarnya. Hal demikian ini tampaknya masih akan merupakan bagian penting dalam perdagangan internasional hingga beberapa tahun yang akan datang, khususnya di antara negara-negara yang sedang bergerak ke arah industrialisasi.

Karena itu, dalam semangat pembaruan negara-negara sosialis memang terdapat tantangan dan harapan dari segi ekonomi. Kewaspadaan terhadap kemungkinan timbulnya tantangan dalam perdagangan internasional ini memang harus sejak dini disadari, bahkan bukan saja dari negara-negara sosialis tetapi juga dari negara-negara non-sosialis lainnya. Tetapi kalau usaha pembaruan ekonomi sosialis itu juga memberi peluang bagi peningkatan perdagangan internasional Indonesia, yang kini merupakan salah satu prioritas strategi pembangunan ekonominya, peluang semacam itu hendaknya tidak disia-siakan. Intinya, jika pembaruan ekonomi itu juga memberikan keuntungan-keuntungan tertentu bagi *kepentingan nasional*, baik dalam pengertiannya yang luas maupun sempit, hal itu harus juga dimanfaatkan. Sebaliknya, hal-hal yang dapat merugikan kepentingan perlu dihindari. Oleh sebab itu, bagaimana mengatasi kompetisi di pasaran internasional, memelihara dan meningkatkan hubungan dagang yang kini telah ada dengan semua pihak, dan bagaimana menjaga agar investasi luar negeri terus terselenggara sesuai kebutuhan yang diproyeksikan adalah faktor-faktor penting yang seharusnya mewarnai kebijakan Indonesia.

Bersamaan dengan itu, pertimbangan politik, keamanan dan strategis juga merupakan bagian yang harus diperhitungkan dalam menanggapi usaha-usaha pembaruan negara-negara sosialis itu. Jika benar bahwa negara-negara komunis yang kini tengah mengupayakan pembaruan itu juga makin

menyadari interdependensi internasional dalam perekonomian mereka, hal ini juga membawa implikasi politik dan keamanan. Kalau sementara mereka mengusahakan pembaruan ekonomi yang membutuhkan lingkungan ekonomi internasional yang baik juga terus bersikap agresif terhadap dunia non-komunis, sambutan masyarakat non-komunis terhadap inisiatif semacam itu mungkin tidak akan menggembirakan bagi usaha mereka sendiri. Karena itulah mereka mulai berusaha menciptakan iklim yang mendukung usaha pembaruan ekonominya. Pernyataan-pernyataan tentang hidup berdampingan secara damai, kerjasama internasional, prinsip menghormati kedaulatan nasional, dan tidak campur-tangan dalam masalah-masalah dalam negeri negara lain sudah banyak dilontarkan. Bukti untuk itu memang yang ditunggu.

Setelah masalah Kampuchea dan Afghanistan, sikap negara-negara komunis paling tidak adalah berada pada *status quo* jika janji-janji Soviet dan Vietnam untuk menarik pasukannya dari negara lain pun tidak segera ditepati. Jika hal itu dilaksanakan, kendati melalui proses yang bertahap dan mungkin jangka waktunya cukup panjang, sebagai "imbalan" kepada dunia internasional demi terselenggaranya usaha pembaruan mereka, hal ini tentu akan menjadi faktor positif dalam percaturan politik dan keamanan internasional. RRC selama ini juga telah menunjukkan sikapnya yang jauh berbeda daripada selama negeri ini dilanda krisis domestik tahun-tahun 1960-an dan awal dasawarsa 1970-an. Kepentingannya akan iklim yang mendukung dan modal untuk berhasilnya modernisasi Cina hingga akhir abad XX ini tampaknya mendorong Cina untuk menjadi pelaku dalam hubungan internasional yang lebih akomodatif dan bertanggungjawab dalam keamanan internasional, meski Vietnam akan mengingat pelajaran yang diberikan oleh RRC awal tahun 1979 sebagai konsekuensi intervensinya atas Kamboja.

Dari segi ini tampaknya yang dapat dilakukan oleh Indonesia adalah ikut mengusahakan agar negara-negara komunis menjadi anggota masyarakat internasional yang lebih bertanggungjawab atas stabilitas dan keamanan, khususnya di wilayah Asia Tenggara dan Asia-Pasifik pada umumnya. Misalnya, terus mengucilkan Vietnam, RRC, atau Uni Soviet dalam masalah-masalah penting yang berkaitan dengan stabilitas dan keamanan di kawasan mungkin hanya akan merugikan semua pihak. Pengalaman usaha penyelesaian masalah Kamboja yang berlarut-larut mungkin merupakan salah satu contoh pelajaran dalam bidang ini. Apapun usaha yang hendak dilakukan terhadap situasi politik, keamanan dan ekonomi di kawasan ini tanpa mau mengakui bahwa negara-negara sosialis itu juga mempunyai kepentingan di sini, tenaga dan waktu akan lebih banyak terbuang. Mereka adalah bagian dari realitas hidup di kawasan ini. Oleh sebab itu mereka dapat ikut memainkan peranan yang positif dan konstruktif bagi perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan.

Para Penulis

ANALISA No. 6 dan No. 8, 1987

ANGGORO, J. Kusnanto. Berijazah Sarjana Muda bidang Elektro, Institut Teknologi Bandung dan Sarjana Hubungan Internasional dari FISIP, Universitas Indonesia tahun 1985; sejak 1986 menjadi anggota Departemen Hubungan Internasional (HI) CSIS, Staf Peneliti terutama dalam bidang Strategi, Eropa Timur dan Timur Tengah.

BUDHYARTO, Yakob. Sarjana Hubungan Internasional dari FISIP, Universitas Parahyangan, 1986; mulai tahun 1987 menjadi anggota Departemen HI CSIS, Staf Peneliti dalam masalah Asia Timur Laut, khususnya Semenanjung Korea.

DEWANTO, Wisnu. Sarjana Hukum Internasional dari Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 1985; sejak Agustus tahun itu menjadi anggota Departemen HI CSIS, menangani penelitian dalam bidang Organisasi Internasional, Hukum Laut, Afrika Barat Daya & Selatan serta sebagian Amerika Latin.

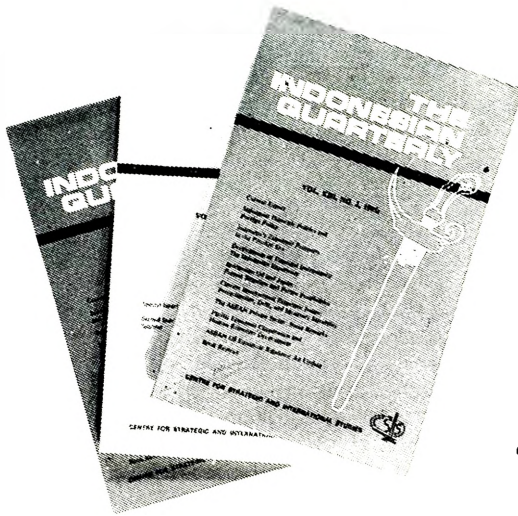
DJIWANDONO, J. Soedjati. Berijazah B-1 Bahasa Inggris, 1960; Diploma Guru Bahasa Inggris dari Victoria University, Wellington, Selandia Baru tahun 1961; BA di bidang Ilmu Politik & Bahasa Rusia dari Universitas Otago, Dunedin, Selandia Baru, 1965; MSc dan Ph.D. dalam Hubungan Internasional dari London School of Economics and Political Science (LSE), Universitas London, 1982; kini anggota Dewan Direktur CSIS, Editor *ANALISA* (CSIS) dan Editor *Jurnal Ilmu Politik* (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, AIPI); sebelumnya adalah Ketua Departemen HI dan Editor *The Indonesian Quarterly* (CSIS); pengamat dan peneliti dalam masalah Strategi, hubungan Timur-Barat, Strategi dan Politik Luar Negeri Soviet, Komunisme Internasional dan masalah-masalah kawasan Asia Tenggara.

RUKMO, Endi. Lulusan Akademi Hubungan Internasional, 1980 dan MA dalam Hubungan Internasional dari Australian National University (ANU), Canberra, Australia, 1982; kini anggota Departemen HI CSIS, peneliti dan pengamat dalam masalah Asia Timur Laut, khususnya Cina.

SUTOPO, AR. Sarjana Hubungan Internasional dari Fakultas Sospol, Universitas Gadjah Mada tahun 1975 dan MA dalam Hubungan Internasional dari ANU, Canberra, Australia, 1983; kini Ketua Departemen HI CSIS; Redaksi *Jurnal Ilmu Politik* (AIPI); peneliti dan pengamat dalam masalah Strategi, hubungan Timur-Barat, dan kawasan Asia Tenggara.

USMAN, Asnani. Sarjana Hubungan Internasional dari Fakultas Sospol, Universitas Padjadjaran, Bandung tahun 1978; sejak tahun itu pula menjadi anggota Departemen HI CSIS; peneliti dan pengamat dalam bidang Hukum Laut, masalah-masalah Asia Tenggara khususnya Indocina, dan Pasifik Barat Daya.

The Indonesian Quarterly



The Outstanding Journal on Indonesian Problems

- The journal for scholars, diplomats, and journalists on Indonesian problems and related issues
- Keep you up-to-date
- Mostly by Indonesian writers
- Published since 1972 in January, April, July and October.

CSIS also publishes an Indonesian Journal ANALISA and books on socio-economic and international affairs:

- **Trends in Marketing,**
J. PANGLAYKIM.
- **Law in Indonesia,** *SOEBEKTI*
- **Golkar: Functional-Group Politics in Indonesia**
Julian M. BOILEAU
- **Pacific Economic Cooperation: The Next Phase,**
Hadi SOEASTRO and HAN Sung-joo (Eds.)



Centre for Strategic and International Studies
Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta 10160.
Phone : 356532-35. Telex : 45164 CSIS IA.



ISSN 0126-222X